

## Pertemuan Ke 6

# PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI DAN PEMILU



1. Menurut Aristoteles, Demokrasi dinilai sebagai sistem pemerintahan dan politik yang **PALING BURUK** (*bad government*) dan mudah tergelincir menjadi **MOBOKRASI** (*government by mass/mob*) atau **ANARKI**. Demokrasi sering dikaitkan dengan filosofi dan gaya yang dipraktekkan di negara yang bersangkutan sehingga lahir istilah : demokrasi rakyat, **demokrasi terpimpin**, demokrasi liberal, demokrasi proletar, **demokrasi Pancasila**.



**2. Suatu negara memilih sistem pemerintahan/politik demokrasi didasarkan kepada :**  
**(Ramlan Surbakti, dkk 2008:8-9) :**

**1).Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik;**

**2).Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi manusia bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis;**

**3).Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas;**



- 4). Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka;**
- 5). Demokrasi memberikan kesempatan sebesar - besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasib hidupnya di bawah hukum pilihannya;**
- 6). Demokrasi memberikan kesempatan sebesar - besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;**
- 7). Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total;**



**8). Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif lebih tinggi;**

**9). Demokrasi modern tidak membawa peperangan bagi negara penganutnya;**

**10). Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya dari pada pemerintahan yang tidak menganut paham demokrasi.**



**3. Salah satu inti wujud Demokrasi adalah : PEMILU, tetapi Demokrasi bukan atau tidak sama dengan PEMILU.**

**Namun PEMILU harus dilaksanakan secara Demokratis. Sehingga Pemilu dan Demokrasi, memiliki hubungan yang sangat erat.**

**Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan:**

***“Qonditio sine qua non, the one can not exist without the others”***

**4. Dalam Pemilu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menentukan derajat kualitas Demokrasi. Oleh karena itu dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu,**

**Demokrasi dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tingkatan :**



**1). Demokrasi Prosedural: Mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui Pemilu LUBER-JURDIL dan AKUNTABEL, disebut juga Demokrasi Minimalis. (Joseph Schumpeter dan Huntington);**

**2). Demokrasi Agregatif: Tidak hanya berupa keikutsertaan dalam Pemilu yang LUBER-JURDIL dan AKUNTABEL, tetapi : Cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip *Self-Government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai undang-undang dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga negara. (Robert Dahl)**



### **3). Demokrasi Deliberatif, :**

**Undang-undang dan kebijakan publik harus dirumuskan  
berdasarkan alasan  
dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga  
negara secara rasional,  
karena menekankan pentingnya :  
Otonomi, persamaan, dan kesetaraan individu, sehingga  
disebut juga  
“*reasoned rule*”.**

**(Dennis Thompson, Amy Gutmann).**





#### **4. Demokrasi Partisipatoris :**

**Menyetujui pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti Self Government, persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, namun juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih, terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.**

- 5. Demokrasi dan proses demokratisasi, harus didasarkan pada standar-standar HAM, agar lebih bermakna partisipatoris dan emansipatoris, jika tidak, demokrasi akan mudah dikooptasi dan diselewengkan.**

**(Dias, Clarence 1993)**



**6. Demokrasi ada Pemilihan, tetapi tidak semua Pemilihan adalah DEMOKRATIS, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar : Lambang, tetapi harus : kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif, yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan yang jelas. (Jeane Kirkpatrick, 1991).**

**7. Suatu Pemilu demokratis atau tidak demokratis, dapat diukur dengan 3 (tiga) kriteria:**

- 1). Ada atau tidaknya pengakuan, perlindungan dan pemupukan/pengembangan HAM;**
- 2). Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang *legitimate*;**
- 3). Terdapat persaingan yang adil dari para peserta Pemilu.**



# PEMBAHASAN

1. Kapan demokrasi disebut sebagai sistem politik yang jelek? Jelaskan
2. Bagaimana praktek demokrasi dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat di NKRI? Jelaskan dan berikan contohnya.
3. Bagaimana hubungan antara pemilu dengan demokrasi? Jelaskan
4. Sebutkan dan jelaskan tingkatan – tingkatan demokrasi dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam berpemerintahan maupun pembangunan?
5. Mengapa saat ini sistem demokrasi cenderung dipilih sebagai sistem politik yang terbaik?

## Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, pukul 23.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.